

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA NO. 7 TAHUN 2012
TERHADAP PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DI PASAR LOAK/UNGGAS SIDOARJO**

SKRIPSI

OLEH

HENDRI FAJAR SETIAWAN

NIM. C92214144



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama :Hendri Fajar Setiawan
NIM :C92214144
Fakultas/Jurusan/prodi :Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :Analisis Hukum Islam dan Perda No. 7 Tahun 2012
terhadap Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar di
Pasar Loak/Unggas Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 desember 2017



Yang menyatakan
Hendri Fajar Setiawan

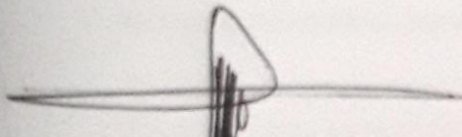
NIM. C992214144

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Fajar Setiawan NIM. C92214144 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, tanggal 06 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

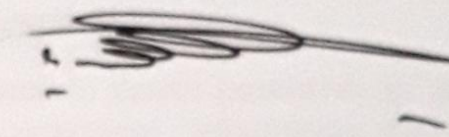
Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



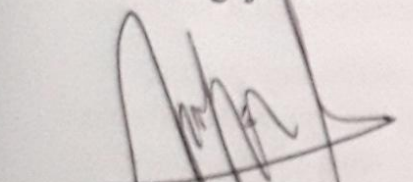
Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji II



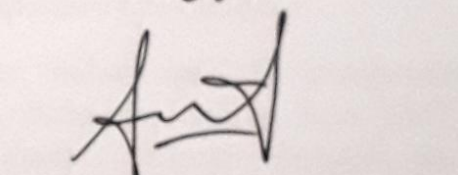
M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji III



Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV



Ikhsan Ratah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 15 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



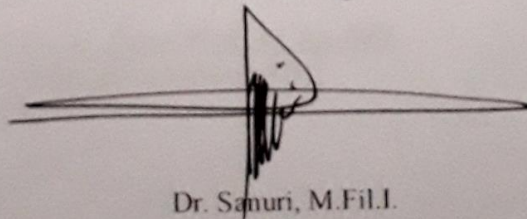
Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag, MH.
NIP. 196803091996031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Fajar Setiawan NIM:C92214144 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Desember 2017

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Samuri', written over a horizontal line.

Dr. Samuri, M.Fil.I.

NIP : 197601212007101001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HENDRI FAJAR SETIAWAN
NIM : C92214144
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : hendri.fajar16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ jpsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDA NO.7 TAHUN 2012 TERHADAP
PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR LOAK/UNGGAS
SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Februari 2018

Penulis

(Hendri Fajar Setiawan)

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM.....		i
PERNYATAAN KEASLIAN.....		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....		iii
PENGESAHAN.....		iv
ABSTRAK.....		v
MOTTO.....		vi
KATA PENGANTAR.....		vii
DAFTAR ISI.....		ix
DAFTAR TABEL.....		xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....		xii
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah.....		1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....		9
C. Rumusan Masalah.....		10
D. Tujuan Penelitian.....		10
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....		11
F. Definisi Operasional.....		11
G. Kajian Pustaka.....		12
H. Metode Penelitian.....		14
I. Sistematika Pembahasan.....		18
BAB II KONSEP IJARAH DALAM ISLAM DAN PERDA NO 7 TAHUN 2012		
A. Ijarah		
1. Pengertian <i>ijārah</i>		20
2. Dasar hukum <i>ijārah</i>		23
3. Rukun dan Syarat <i>ijārah</i>		26
4. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh Mu’jir (orang yng menyewakan) dan Musta’jir (penyewa).....		32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah membagi atas daerah-daerah dan daerah-daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap daerah tersebut mempunyai kewenangan mengatur sendiri pemerintahannya. Pemerintah daerah meningkatkan pemerintahan tersebut. Pemerintah daerah mengenakan pungutan kepada masyarakat . berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama ini pungutan daerah yang berupa retribusi dan pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000¹ dan telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Perbedaan pajak dan retribusi. Pajak adalah iuran dari rakyat/ penduduk kepada kas negara atau dengan kata lain peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara persorangan.²

Sedangkan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Hal ini membuat retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi

¹ <http://www.google.co.id/search=apa-latar-belakang-lahirnya-uu-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah.html> akses 8 Agustus 2017

² Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), 37.

antara pihak penyewa dengan mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil dengan harga tertentu dan waktu tertentu.⁷

Ulama fiqh bersepakat atas legalnya akad *ijārah* kecuali Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena *ijārah* menjual manfaat padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana tidak boleh menggantungkan jual beli pada masa akan datang. Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut tidak ada saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai ini atau manfaat antara tercapai dan tidaknya seimbang⁸

Mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijārah* dengan dalil al-Quran
Dalam QS *al-Taḥāq* ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئْرَضِعْ لَهُ أُولَا أُخْرَى ٦

Artinya :Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

⁷ Saiful jazil. *Fiqh muamalah* (sidoarjo: CV cahaya intan XII. 2014) 127.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta:Gema Insani dan Darul Fikir.2007), 38.

Juga dalam surat *al-Qaṣaṣ* 26-27

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"(QS *al-Qasas* 26). Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (QS *al-Qasas* 27).¹⁰

1. Menurut Ali al-Khafif, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama' syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut ulama' malikiyah dan hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 7*, (Jakarta:widya cahaya,2011), 280.

Dilihat dari objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam:

- Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.

- ¹¹ Abu Azam Al Hadi, *fiqh muamalah kontemporer*, (Sidoarjo :CV cahaya intanXII. 2014), 72-73.

- b. Sewa-menyewa toko.
- c. Sewa-menyewa kendaraan.
- d. Sewa-menyewa pakaian.
- e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.¹²

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat Dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yg disewakan.¹³ Selain itu hak dan kewajiban yang menawarkan jasa dan yg menikmati jasa harus terpenuhi, adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja, dia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.¹⁴

Demikian juga dengan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, dimana kemaslahatan individu dan Bersama harus saling mendukung. Dalam arti kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemaslahatan.¹⁵

¹² Muhammad yazid, *hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah)*,(sidoarjo:CV cahaya intan XII.2014) 202.

¹³ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (bandung:Mandar Maju,1992) 161.

¹⁴ Muhammad Syarif Chaudrhry. *Sistem Ekonomi Islam: prinsip dasar*. (Jakarta: Prenamedia Group. 2012) 195.

¹⁵ Imam Buchori dan Siti Musfiqoh. *Sistem Ekonomi Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014) 26.

lingkungan pasar.¹⁶

Di lapangan yang tepatnya di pasar Loak/unggas Sidoarjo. Penulis menemui pedagang, menurut para pedagang dinas pasar mengenakan pungutan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 2000 setiap hari tetapi dalam pembayaran retribusi tersebut pedagang tidak meminta karcis/kwintansi pembayaran retribusi tersebut padahal unit pasar sudah menyediakan karcis. Di samping itu juga ada ketidakrelaan disetiap hari minggu unit pasar meminta pungutan retribusi pelayanan pasar tetapi pada hari minggu unit pasar tidak melaksanakan kewajibannya membersihkan sampah yang ada dipasar dan tidak memindahkan sampah ke tempat pembuangan sementara, padahal dihari senin sampai sabtu unit pasar selalu melaksanakan kewajibannya membersihkan pasar dan membuang sampah ketempat pembuangan sementara, di hari minggu unit pasar juga butuh libur sehingga pekerjaan hari minggu dikerjakan sekaligus dengan hari senin tetapi disini

- ¹⁶ Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan pasar, 7.

[illegible]

Dari kenyataan diatas penulis menyadari bahwa hak dari pedagang pasar pada hari minggu tidak terpenuhi, secara tidak langsung pedagang pasar merasa kecewa karena ada hak yg belum terpenuhi. Hal inilah yang menuntun peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisi Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo”.

Dari pemaparan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dikaji adalah.

- ¹⁷ Juhary, (pedagang pasar loak/ungags Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 6 Juni 2017.

Ketiga skripsi Ibriza Ulfah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Mananggal Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang parkir tidak mempunyai izin pelaksanaannya (illegal) dan dilihat dalam prospektif Hukum Islam adalah hukumnya haram, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam Hukum Islam. Serta barang atau lahan yang digunakan sebagai lahan parkir merupakan bukan milik sendiri dan tanpa izin pemilik lahan.²¹

²¹ Ibriza Ulfah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Mnanggal Surabaya" (skripsi--Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya, 2011).

dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi *Ijārah* yang meliputi definisi *ijārah*, landasan hukum tentang *ijārah*, rukun *ijārah*, syarat sahnya *ijārah*, mempercepat dan menanggihkan upah, bentuk *ijārah* yang dilarang oleh islam, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, dan pengembalian obyek *ijārah*. Selain itu bab ini berisi tentang Perda No 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar.

Bab ketiga dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini akan menjelaskan tentang gambaran umum retribusi pelayanan pasar dan lokasi penelitian, pembayaran retribusi pelayanan pasar dan realisasi pelayanan atas pembayaran retribusi pelayanan pasar.

Bab keempat dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini akan menjelaskan tentang analisis data dari hasil penelitian yakni pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo.

Bab kelima dalam bab Analisis Hukum Islam dan Perda No 7 Tahun 2012 terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo ini akan menjelaskan tentang penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM ISLAM DAN PERDA NO 7 TAHUN 2012

A. *ijārah*

1. Pengertian *ijārah*

Menurut sayyid sabiq *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah)¹. Secara bahasa menurut Rahmad syafi'i, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya fikih muamalah, menyatakan bahwa *ijārah* secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).²

Menurut Muhammad shalih al munajjid dalam bukunya intisari fikih Islam yang diterjemahkan oleh Nurul muklisin menyatakan *ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan.³

Sedangkan menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *ijārah* ialah akad terhadap suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu.⁴ menurut zainudin Ali dalam bukunya Hukum perdata Islam di Indonesia

¹ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* 13, Kamaluddin A, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 7.

² Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

³ Muhamad Shalih al- munajjid, *Intisari fiqih Islami*, Nurul mukhlisin, (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 159.

⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul muslim*, Mustofa 'Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 678.

Menurut Saleh al Fauzan , *ijārah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijārah* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.⁶

Dari beberapa definisi di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dan/atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (upah).

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama', antara lain:

1. Menurut Ali al-Khafif, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama' syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

⁶ Shaleh al-Fauzan, *Fiqih shari-hari*, ter Abdul hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.⁷

Pemilik yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan penyewa manfaat disebut *musta'jir*, sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dan pendapatan yang diterima dari akad atau transaksi *ijārah* disebut *ujrah* (upah).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengeluarkan sesuatu gaji dan imbalan.¹⁰

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual*, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka

¹⁰ KBBI, Upah', dalam <http://kbbi.web.id/upah.html>, diakses pada 29 September 2017.

- faatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang yang menyewa atau mengupah untuk melakukan suatu pekerjaan.
- Manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ijārah* harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi dalam akad ini dan bukan aset itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam obyek akad ini adalah:
- Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang yang harus dapat dinikmati. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan. Manfaat yang harus dipenuhi harus yang bisa diperbolehkan.

[illegible]

- b) *Ijārah* (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus.
- c) Hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli.
- d) Hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli).
- e) Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah *ijārah* atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan).
- f) Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijārah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil, seperti penyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan.
- g) Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli.

[illegible]

- liknya boleh meminta bayaran setelah penyewa menga-
tuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan.
selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang
ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik
harganya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut.
g yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan
kerjanya dengan baik. Haram baginya menipu dan
mencuri pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus
memanfaatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut.
hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan
tugasnya.²⁸

liknya boleh meminta bayaran setelah penyewa menga-
tuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan.
selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang
ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik
harganya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut.
g yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan
kerjanya dengan baik. Haram baginya menipu dan
mencuri pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus
memanfaatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut.
hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan
tugasnya.²⁸

liknya boleh meminta bayaran setelah penyewa menga-
tuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan.
selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang
ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik
harganya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut.
g yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan
kerjanya dengan baik. Haram baginya menipu dan
mencuri pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus
memanfaatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut.
hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan
tugasnya.²⁸

liknya boleh meminta bayaran setelah penyewa menga-
tuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan.
selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang
ganti, sehingga ia tidak berhak diterima oleh pemilik
harganya apa yang digantikan dengan bayaran tersebut.
g yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan
kerjanya dengan baik. Haram baginya menipu dan
mencuri pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus
memanfaatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut.
hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan
tugasnya.²⁸

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hnafiyah berpendapat bahwa *Ijārah* batal karena meninggalnya seorang pelaku akad, yakni *musata'jir* atau *mu'jir*. Hal itu karena apabila akad *ijārah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musata'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiyah. Akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *Ujrah*.²⁹

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan. Maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan, mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhnya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syaifi'I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 326-327.

zat benda yang disewa kepada *musta'jir*. Ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.³⁰

Hak menerima upah bagi *mustajir* adalah sebagai berikut:

1) Selesai bekerja

Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَحِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَيْفَّ عَرْفُهُ

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering."* (HR. Ibn Majah)³¹

2) Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang

Apabila ada kerusakan pada 'ain (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* batal.

3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi seluruhnya.

4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran³²

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada), 121.

³¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a'qalani, *Bulughul maram*, Hamim Thohari Ibnu M Dalimi, (Jakarta, PT Gramedia), 318.

³² Ibid, 121.

- a) Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat dari peningkatan margin keuntungan dan penggunaan langsung.
 - b) Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa penggunaan langsung dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikecualikan (pada biaya yang pantas) dari mengkonsumsi pelayanan kecuali apabila dibayar dengan asumsi bahwa kebanyakan keuntungan dari sebuah pelaporan atau fasilitas diterima oleh pengguna barang.
 - c) Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastis harganya.
 - d) Margin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh dalam menentukan retribusi.⁴²
4. Golongan dan jenis retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pada pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi ada;lah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sejak 1 Januari 2010 menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi

⁴² Imam Soebechi, *judicial review perda pajak dan retribusi daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 128.

pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi pelayanan pasar. Pasar sebagai salah satu bagian dari aktivitas ekonomi wilayah memiliki fungsi dan peranan yang tidak terpisahkan dari kegiatan masyarakat. Perkembangan kehidupan perekonomian mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat harus didukung adanya fasilitas bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

b. Dasar hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten/kota dalam lingkungan propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Ketentuan Retribusi

- 1) Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- 2) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- 4) Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- 5) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- 6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- 7) Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibahas.
- 8) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- 9) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

BAB III

A. Gambaran umum Pasar Loak/Unggas

Pasar loak/unggas yang tepatnya berada di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidaorjo. Letaknya yang strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pasar ini selalu ramai tidak pernah sepi, karena letak Pasar Loak/Unggas ini berada di belakang pasar Larangan Sidoarjo berada di depan jalan raya yang banyak dilalui kendaraan angkot, dari arah selatan jurusan ke Surabaya, dari arah utara jurusan Pasuruan. Selain itu pasar loak/unggas juga berdekatan terminal larangan, sehingga para pengunjung yang akan ke pasar Loak/Unggas mudah sekali transportasinya.

Meski pasar Loak/Unggas ini berada di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, namun pengunjungnya entah ini pedagangnyapun pembelinya banyak yang dari luar kecamatan Candi, seperti daerah Tulangan, Tanggulangin, Krian, Gedangan, Buduran yang lari ke pasar Loak/Unggas, padahal di daerah tersebut juga ada pasar. Alasan ini karena lengkapnya barang atau hewan yang di jual di pasar Loak/Unggas ini berdasarkan pengakuan dari salah satu pedagang.¹

Mayoritas para pedagang yang ada di pasar Loak/Unggas hampir 70% adalah orang-orang Madura yang pindah ke Sidoarjo untuk bekerja. Mereka kebanyakan sudah

¹ Dullah, pedagang stand los, hasil wawancara pribadi, tgl 30 oktober 2017.

Menurut pemaparan bendahara pasar loak/unggas Sidoarjo berikut nama-nama petugas yang ada di pasar loak/unggas Sidoarjo :

1. Bendahara : Glendang
2. Pengadministrasian : Nuliagung
3. Keamanan : -
4. Juru punggut : Bashori alwi
5. Kebersihan : Tenaga harian lepas (Heru kusmianto, Edisanto, santoso, Arif rahman hakim)

pemungutan retribusi pelayanan pasar di pa
ngambil pungutan dari kios ke kios. Pengamb
am 08.00 WIB sampai sore hari, hal ini

Untuk praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar di pasar Loak/Unggas Sidoarjo adalah mengambil pungutan dari kios ke kios. Pengambilan pemungutan retribusi dimulai jam 08.00 WIB sampai sore hari, hal ini dikarenakan para pedagang membuka dagangannya ada yang pagi, siang hari. Yang dilakukan oleh petugas (UPT pasar sidoarjo). Retribusi dipungut untuk setiap kios yang beroperasi saja, apabila kios sedang tutup maka retribusi tidak akan di pungut. Setiap pembayaran retribusi akan diberikan karcis atau bukti pembayaran retribusi. Nominal retribusi pelayanan pasar dipungut berdasarkan perda No 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar, tetapi ada perubahan tarif retribusi pelayanan

minggu tidak melaksanakan pembersihan pasar tetapi tetap meminta pemungutan retribusi pelayanan pasar, disini saya merasa hak saya belum terpenuhi. ⁵

Kedua, udin pedagang makanan dan lampu mengungkapkan bahwa setiap hari minggu petugas tidak membersihkan pasar tetapi tetap meminta pemungutan retribusi, cak din juga mengungkapkan bahwa dari dulu memang di hari minggu upt pasar tidak membersihkan pasar tetapi tetap memungut retribusi pelayanan pasar. bahkan cak din rela membayar iuran kebersihan lagi untuk pembersihan khusus di hari minggu.⁶

Ketiga, joko pedagang jual beli burung, mengungkapkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan setiap hari dari hari senin sampai minggu tetapi pelayanan kebersihan pada hari minggu libur tetapi pelayanan kebersihan yang diberikan pada hari senin sampai sabtu sudah cukup baik.⁷

Keempat, kotib karyawan penyembelih ayam, mengungkapkan bahwa pelayanan pasar pada hari minggu libur tetapi tetap meminta pemungutan retribusi pelayanan pasar.⁸

Kelima, arif wijaya pedagang burung juga mengungkapkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan pasar di lakukan setiap hari dan untuk pelayanan kebersihan

⁵ Juhary, (pedagang pasar loak/ungags Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, Tanggal 6 Juni 2017.

⁶ Udin, (pedagang pasar loak/unggas Sidoarjo), wawancara,Sidoarjo Tanggal 22 Oktober 2017.

⁷ Joko, (pedagang pasar Loak/Unggas Sidoarjo), wawancara, Sidoarjo, Tanggal 22 Oktober 2017.

⁸ Kotib, (karyawan pasar Loak/Unggas Sidoarjo), wawancara, Sidoarjo, Tanggal 22 Oktoberr 2017.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab III, dalam pengambilan retribusi pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo oleh upt pasar Sidoarjo. Pemungutan tersebut diambil setiap hari, setiap pagi sampai sore, retribusi hanya dikenakan pada stand-stand yang beroperasi, besar tarif bermacam-macam berdasarkan ukuran stand masing-masing.

Dalam perjanjian sewa disini terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar retribusi (para pedagang) dan pihak kedua adalah orang yang menerima retribusi (upt pasar Sidoarjo). Pada awal perjanjian dimulai, upt pasar Sidoarjo mengemukakan bahwa untuk dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah (stand) dan mendapatkan pelayanan lainnya yaitu pelayanan keamanan dan pelayanan kebersihan. Maka para pedagang harus memenuhi aturan yang telah ditentukan yakni membayar uang retribusi pelayanan pasar yang telah ditentukan pada saat kios beroperasi.

Untuk praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo adalah dengan pungutan dari stand ke stand. Pengambilan pungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan mulai jam 08.00 WIB sampai sore hari dikarenakan waktu pedagang membuka stand yang tidak menentu. Yang dilakukan oleh petugas (upt pasar sidaorjo) secara bergantian. Retribusi dipungut untuk setiap stand yang beroperasi saja, apabila stand tutup maka retribusi tidak akan dipungut.

(barang dalam jual beli). Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan pasar status upah sudah jelas karena nominal upah berdasarkan Perda No 7 tahun 2012.

Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah ijarah atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan). Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar mubah.

Kemudian, kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijārah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Dalam penerapannya manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar bisa diambil secara penuh tetapi pada hari minggu pelayanan kebersihan tidak dilaksanakan sehingga pedagang tidak bisa mengambil pelayanan kebersihan.

Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli. Dalam penerapannya upt pasar sidoarjo adalah pengelola pasar Loak/Unggas Sidoarjo.

Kemudian rukun yang terakhir adalah hendaklah masa ijarah itu diketahui, sehingga tidak sah *ijārah* untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan perselisihan. Dalam hal ini penerapannya sudah jelas waktu atau masa sudah jelas yaitu per hari.

Didalam lapangan penulis menemukan kegagalan yakni pelayanan kebersihan pada hari minggu libur yang seharusnya dilaksanakan setiap hari senin sampai minggu.

2. Analisis Perda No 7 terhadap pembayaran retribusi pelayanan pasar

retribusi daerah merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan memberikan kontribusi timbal balik kepada wajib pajak.¹⁰ Sementara itu definisi yuridis retribusi daerah menurut ketentuan pasal 1 UU no 28 Tahun 2009, yaitu:

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.”¹¹

Pengertian jasa menurut uraian diatas adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.¹²

¹⁰ Roristua Pendiangan, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 11.

¹² Ida Zuraida, *Teknik penyusunan peraturan daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 86.

BAB V
PENUTUP

A. Keimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktik Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Loak/Unggas Sidoarjo, pedagang menyewa stand ke UPT Pasar Sidoarjo dengan harga yang ada di Perda No 7 Tahun 2012, setelah itu pedagang bisa menempati stand dengan kesepakatan UPT Pasar Sidaorjo setiap hari memungut retribusi pelayanan pasar jam 08.00 sampai selesai, setelah itu UPT memberikan izin menempati stand dan memberikan pelayanan kebersihan dan keamanan. Namun pada hari minggu pelayanan kebersihan libur tetapi tetap dipungut retribusi pelayanan pasar.
2. Menurut hukum Islam praktik pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas Sidoarjo, tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat *ijārah* yaitu manfaat jasa belum bisa diambil secara penuh. Tidak sah bagi UPT Pasar Sidoarjo karena dalam *ijārah* tersebut jika manfaatnya tidak bisa diambil oleh pedagang. Sedangkan menurut Perda No 7 Tahun 2017, praktik pemungutan Retribusi pelayanan pasar di Pasar Loak/Unggas melanggar hukum karena tidak memenuhi Pasal 22 ayat 1 poin b, Yaitu tidak memberikan hak pedagang berupa pelayanan kebersihan pada hari Minggu.

um Perdata Islam di Indonesia,. Jakarta:Sinar Grafika, 2005.

(al) Ibnu Hajar. *Bulughul maram*, Hamim Thohari Ibnu M...

amedia,t.t.

ode Penelitian Ilmu Dakwah,. Jakarta: Logos, 2001.

Musfiqoh, Siti. *Sistem Ekonomi Islam*.. Surabaya: UI...

014.

mad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: prinsip dasar*..

oup, 2012.

um Islam. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Fiqih sehari-hari, ter Abdul hayyie al-Kattani. Jakart...

005.

- um Perdata Islam di Indonesia*., Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- (al) Ibnu Hajar. *Bulughul maram*, Hamim Thohari Ibnu M...
- amedia,t.t.
- ode Penelitian Ilmu Dakwah*., Jakarta: Logos, 2001.
- Musfiqoh, Siti. *Sistem Ekonomi Islam*.. Surabaya: UI...
- 014.
- mad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: prinsip dasar*..
- oup, 2012.
- um Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Fiqih sehari-hari*, ter Abdul hayyie al-Kattani. Jakart...
- 005.

